Transparansi Anggaran, Wujudkan Tata Kelola Penyelenggaraan Pemerintahan Prima

Selasa, 4 Mei 2021

Transparansi anggaran merupakan kunci utama dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik. Hal ini diungkapkan oleh Direktur Koordinasi dan Supervisi Wilayah III KPK RI Brigjen Bachtiar Ujang Purnama dalam Rapat Koordinasi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pemerintah Daerah (Pemda) di Jawa Timur. Transparansi anggaran diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap kinerja pemerintah, serta mendorong rasa puas terhadap pelayanan publik yang diberikan.

Dengan menerapkan transparansi, pemerintah dapat mencegah terjadinya tindak korupsi yang dapat merugikan negara dan masyarakat. Korupsi bisa memicu berbagai masalah seperti inefisiensi layanan publik, perlambatan pertumbuhan ekonomi, dan dampak negatif lainnya.

KPK hadir sebagai upaya preventif untuk membantu pemerintah dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. KPK siap berkoordinasi dan bersinergi dengan kepala daerah di Jawa Timur untuk mencegah terjadinya tindak korupsi.

Melalui transparansi anggaran dan sinergi yang kuat, diharapkan dapat tercipta penyelenggaraan tata pemerintahan yang bersih, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.

Upaya bersama untuk meningkatkan transparansi anggaran dan mencegah korupsi merupakan langkah penting dalam membangun negara yang maju dan sejahtera.

Berita ini diringkas menggunakan AI. Silahkan scan QR code diatas untuk melihat berita aslinya.